

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan individu yang tidak bisa dilepaskan dari orang lain dimana beradapun karena manusia makhluk sosial yang hidup dengan mengembangkan diri melalui hubungan interaksi dengan orang lain. Berarti manusia selalu di libatkan dengan konsekuensi organisasi apapun bentuk dan jenisnya bahkan organisasi yang sederhana dalam pencapaian tujuan, karena organisasi merupakan suatu wadah yang kegiatan orang-orang yang melakukan kerja sama dalam usaha mencapai tujuan.

Telah di jelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang di tuangkan dalam amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan demikian perlu perhatian pemerintah dalam pembangunan dalam bidang pendidikan, baik pembangunan fisik maupun yang bersifat mental dari seluruh komponen yang ada dalam dunia pendidikan.

Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” mengacu pada perspektif pelayanan sebagai produk suatu lembaga konsep administrasi di artikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sebuah keterangan tertulis yang di butuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan ini cenderung di manfaatkannya untuk memenuhi syarat dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa; Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Visi dan Misi pendidikan nasional telah menjadi rumusan dan dituangkan pada bagian “penjelasan” atas UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi dan Misi pendidikan nasional ini adalah merupakan bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan.

Visi Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional mempunyai Visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi Pendidikan Nasional

Dengan Visi pendidikan nasional tersebut, maka pendidikan nasional memiliki Misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu di cermati bahwa pencapaian tujuan organisasi membutuhkan penataan manajemen yang baik dengan menerapkan berbagai fungsi yang terkandung di dalamnya. Menurut Terry, manajemen adalah proses yaitu aktivitas dalam dunia manajemen sebagai P.O.A.C. adalah planning, organizing, accounting, controlling (pengawasan). Dengan kata lain, upaya mewujudkan tujuan organisasi atau lembaga pemerintahan dan swasta yang bergerak di bidang *public service* maupun *profit service* sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan, maka tuntunan penerapan fungsi manajemen (salah satunya pengawasan) sangat di butuhkan jika organisasi menginginkan hasil guna dan daya guna yang tinggi.

Organisasi UPTD Pendidikan yang ada di pemerintahan mempunyai tujuan untuk pengembangan mutu pendidikan. Hal ini sebagai pendekatan dari pemerintah pusat secara nasional kemudian kebijakan dari pemerintah pusat

kemudian dilanjutkan ke tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah seperti saat ini. Peranan daerah dalam mensukseskan kebijakan pemerintah dalam pendidikan nasional dilanjutkan oleh daerah dengan mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disesuaikan dan diatur dalam pemerintah daerah di Setiap Kabupaten seperti yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 Tahun 2008 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bengkalis. Usaha Pemerintah daerah khususnya dalam bidang pendidikan yang salah satunya diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditujukan pada Staf atau Jajaran di Unit Pelaksana Teknis Dinas di setiap Kecamatan, tidak lain bertujuan untuk mengoptimalkan sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ke setiap Pelaksana kebijakan pendidikan beserta lembaga lainnya yang terkait. Suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas pendidikan diharapkan mampu mengakomodir para guru dan pendidik yang ada di daerahnya sehingga bisa berjalan secara optimal demi mensukseskan program pemerintah tentang Pendidikan Nasional. Kesuksesan ini sangatlah erat kaitannya dengan kinerja yang baik, optimal, efisien, transparan, kredibel, dan akuntabel dari suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Menciptakan suatu lembaga yang demikian itu bukanlah suatu hal yang mudah jika diwujudkan. Motivasi yang tinggi dan etos kerja yang baik dari atasan diharapkan dapat menjadi suatu daya dorong yang paling dominan dalam menciptakan suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai kinerja optimal, efisien, efektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Untuk menindak lanjuti cita-cita mulia ini maka diperlukan pembagian kerja dan pelaksanaan tugas dari Tugas

Pokok dan Fungsi. Di setiap lembaga pasti memiliki tujuan pokok yang mendasar dari bentuknya suatu lembaga atau instansi. Instansi ini juga memiliki fungsi tersendiri yang bersifat khusus dalam bidang yang telah diatur dan dalam hal ini adalah pendidikan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan tersebut. Arti tugas pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1215) adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai, uraian tugas (*job description*) bagian/unit kerja dinas pendidikan kecamatan pinggir. wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi:

1. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
2. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain:

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran atau bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar atau bimbingan siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran atau bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar atau bimbingan siswa.

6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan atau pemberian ijazah.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah, memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pengawas Sekolah yang belum memenuhi ketentuan beban kerja karena kondisi tertentu (misalnya jumlah pengawas yang ada belum memenuhi seluruh mata pelajaran) dapat memenuhi kekurangannya dengan:

1. Melaksanakan tugas pengawasan pada mata pelajaran atau rumpun, jenis dan jenjang pendidikan yang berbeda.
2. Mutasi ke daerah lain yang masih kekurangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal jumlah Pengawas Sekolah tidak mencukupi sedangkan jumlah sekolah yang diawasi cukup banyak, maka dapat diberikan tugas melebihi dari jumlah sekolah yang seharusnya diawasi.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan atau bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Menurut Permendikbud No. 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Sekolah ini bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah

melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi :

- a. Penyusunan program
- b. Pelaksanaan pembinaan
- c. Pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
- d. Penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru
- e. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Dari tugas pengawas di atas terdapatnya bagaimana pembinaan kualitas sekolah, suatu pendidikan kualitas sekolah sangat di butuhkan agar disekolah dari tahun ketahun bisa mengalami peningkatan yang lebih baik, agar suatu kualitas yang ingin capai bisa di dapatkan sesuai dengan harapan

Sekolah merupakan suatu lembaga formil yang bertujuan untuk mendidik manusia yang cerdas , bertaqwa Kepada Tuhan yang maha Esa , terampil menjadi budi yang luhur, sehingga tercapainya bangsa indonesia yang seutuhnya. Sekolah merupakan salah satu bentuk manusia yang berbasis yang berkualitas dan mampu mengangkat derajat hidup yang lebih baik perlu adanya kesamaan dari lapisan masyarakat memberi kontribusi yang baik, sehingga mutu pendidikan di Indonesia terlaksana dengan baik, yang yang di utamakan adanya konsisten yang ada setiap sekolah maupun pengawasan yang di lakukan oleh UPTD itu sendiri. Dari sekolah yang ada di Kecamatan Pinggir, SMA Negeri 3 Pinggir adalah salah satu Sekolah yang ber Aktreditasi A, Tetapi di sisi lain yang di dapat fasilitas belum maksimal di lihat dari sudut pengembangan. Pengawasan yang di lakukan oleh pengawas sekolah belum maksimal dari sekolah yang beraktreditas C menjadi ke aktreditas A dimana sekolah ini masih banyaknya kekurangan dalam fasilitas.

Pada Kecamatan Pinggir terdapat 6 Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri) yang di dilakukan pengawasan oleh UPTD dan masing-masing Sekolah sudah terakreditasi. Berikut Nama-Nama SMA Negeri yang ada di Kecamatan Pinggir

Tabel I.1 : Nama Sekolah SMA Negeri Kecamatan Pinggir

No	Nama Sekolah	Lokasi	Akreditasi
1	SMAN 1 Pinggir	Muara Basung	A
2	SMAN 2 Pinggir	Pinggir	B
3	SMAN 3 Pinggir	Serai Wangi	A
4	SMAN 4 Pinggir	Tasik Serai	B
5	SMAN 5 Pinggir	Titian Antui	B
6	SMAN 6 Pinggir	Harapan Baru	C

Sumber : UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir

Dari tabel diatas terdapat 6 sekolah SMA di kecamatan pinggir, disini peneliti pengambil penelitian yaitu SMAN 3 Pinggir

Pengawasan yang di lakukan oleh UPTD Terhadap pendidikan yang khusus nya pendidikan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Terdapat Sekolah yang sudah Ber-akreditas A yang terdapat pada SMA Negeri 3 Pinggir. Dalam tetapi di sisi lain sekolah tersebut belum mempunyai fasilitas yang lengkap terhadap kegunaan Pendidikan dan siswa untuk belajar kemudian Keterlambatannya pengumpulan RPP oleh guru-guru kepada UPTD yang ada di kecamatan Pinggir. Hal ini merupakan masalah dari tahun ketahun. Faktor pendukung keberhasilan pendidikan seperti sarana dan prasarana belajar, kurikulum, sistem evaluasi, dan proses belajar mengajar sendiri sangat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, apalagi bila komponen sekolah, masyarakat, pemerintah, maupun *stakeholders* dikaitkan dengan reformasi pendidikan yang memberikan amanat dan tanggung jawab pada

pemerintah daerah, sehingga maju tidaknya suatu pendidikan di suatu daerah juga sangat tergantung pada kebijakan yang dilaksanakan di daerah tersebut.

Petugas pelaksana pengawasan sekolah yaitu Bapak Armizi S.Pd M.Si golongan III d, Tugas pokok pengawas berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:

- a. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.
- c. perencanaan program kegiatan, penyusunan naskah dinas di bidang pendidikan.
- d. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi kegiatan pendidikan
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala UPTD

Maka dapat disimpulkan sebuah konsep bahwa pengawasan sekolah adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilaksanakan. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang dimaksud adalah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil pekerjaan atau prestasi kerja seseorang atau kelompok terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan karakteristik kelompok kerja dan sebagainya yang diharapkan.

Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan

tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin (1990:284) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar. Sejak berdirinya sekolah SMA Negeri 3 Pinggir adanya melakukan peningkatan yang dialami.

Dari tahun sebelumnya di SMA Negeri 3 Pinggir terdapat peningkatan baik Guru maupun Siswa, berikut perubahannya pada SMA Negeri 3 Pinggir

**Tabel I.2 : Peingkatan di SMA Negeri 3 Pinggir Kabupaten Bengkalis
2014-2017**

No	Tahun	Jumlah	
		Guru	Siswa
1	2014-2015	16	159
2	2015-2016	17	200
3	2016-2017	17	251

Sumber : SMAN 3 Pinggir

Dalam hal ini pengawas sekolah memiliki prosedur untuk berkunjung ke sekolah tetapi setelah melihat di lapangan hal ini tidak sesuai pada prosedur yang ada, yaitu sekitar tiga bulan sekali, tetapi ada yang sekitar enam bulan berkunjung

Dalam suatu organisasi pendidikan adanya yang memberi ilmu dan menerima ilmu, pemberi ilmu yaitu tenaga pengajar atau yang mengajar pada SMA Negeri 3 Pinggir tersebut. Yang terdiri dari 17 tenaga pengajar yaitu 2 PNS, 4 Honor daerah dan 11 honor komite. Selain tenaga pengajar guru juga sebagai pegawai disiplin terhadap siswa/siswinya, berikut nama-nama guru di SMA Negeri 3 Pinggir:

Tabel I.3 : Nama-Nama Guru SMA Negeri 3 Pinggir

No	Nama	Kualifikasi
1	Asni S.Pd	PNS
2	Sri Marlina S.Pd	PNS
3	Suroto S.Pdi	Honor Daerah
4	Eva husna S.Pdi	Honor Daerah
5	Diana A.Md	Honor Daerah
6	Suhaini S.Sos	Honor Daerah
7	Sulastri S.Pd	Honor Daerah
8	Eliya Eka Putri S.Pd	Tenaga Honorer
9	Ratna S.Pd	Tenaga Honorer
10	Devi Herniza S.Pd	Tenaga Honorer
11	Thata Pradesa S.Pd	Tenaga Honorer
12	Ade Kartika Sari S.Pdi	Tenaga Honorer
13	M.Sukani S.Pdi	Tenaga Honorer
14	Drs.Toufik	Tenaga Honorer
15	Puspita SE,Sy	Tenaga Honorer
16	Nurasina Rambe S.Pd	Tenaga Honorer
17	Rini Asmara S.Pd	Tenaga Honorer

Sumber : SMAN 3 Pinggir

Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas terhadap pembinaan kualitas sekolah harus baik, dan sesuai dengan suatu pencapaian yang di inginkan

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang di lakukan pegawai UPTD haruslah optimal dan sesuai dengan pencapaian suatu keinginan terhadap SMA Negeri 3 Pinggir tersebut.

Seberapa baik pengawasan Pegawai yang bersangkutan, apabila kinerja Pegawai tidak maksimal maka diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik. Kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana keberhasilan suatu program dan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi yang dibuat oleh pemerintah dan di sosialisasikan ke daerah-daerah merupakan sebuah kewenangan dari seorang Pegawai dan kewajiban Pegawai adalah

melaksanakan. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Observasi lapangan penulis menemukan berbagai fenomena yang terjadi dilapangan yaitu :

1. Pengawasan yang di lakukan oleh pengawasan sekolah masih kurang, dimana pengawas sekolah melakukan pengawasan dengan akreditasi yang sudah A tetapi dalam hal lain masih terdapat banyaknya kekurang seperti sarana, perlengkapan pembelajaran, seperti data yang ada dibawah ini,

NO	Fasilitas	Jumlah
1	Kelas	6
2	Infocus	1
3	Siswa	251
4	Kursi	148 buah

2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kualitas sekolah dalam melakukan pengawasan yang baik,

Berdasarkan permasalahan dan gejala yang di temui di lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Sekolah Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di SMA Negeri 3 Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas tersebut bahwa yaitu Pentingnya pelaksana pengawasan dengan baik jika pegawainya tidak memahami

akan pekerjaan masing-masing yang di berikan oleh ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu apabila pegawai yang baik dalam menjalankan tugas maka tugas yang di laksanakan akan menjadi lebih baik juga berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dapat dirumuskan dalam permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Sekolah Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di SMA Negeri 3 Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah SMA 3 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
- b. Untuk mengetahui hambatan pegawai terhadap Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah SMA 3 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan akademis : sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Kegunaan teoritis : serta menambah pengetahuan bagi pihak yang ingin meneliti yang sama daerah yang berbeda.
- c. Kegunaan praktis : Meningkatkan keterampilan peneliti dalam mengarahkan dan menyediakan data dan fakta secara jelas dan sistematis.